



Studi tentang Partisipasi Politik Siswa SMA ITP Surabaya: Tantangan dan Peluang dalam Membangun Demokrasi di Kalangan Generasi Muda

Suyono¹, Dwi Retnani Srinarwati², Irnawati³, Ermelinda Wamul⁴, Mayta Nur Azizah⁵, Flavintus Risando⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia

E-mail: suyono@unipasby.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-01-07 Revised: 2026-02-13 Published: 2026-03-02 Keywords: <i>Political Participation; School Democracy; Students; Young Generation.</i>	For the advancement of democracy, the young generation, including high school students, must be able to participate actively. However, student political participation often tends to be procedural and does not fully reflect substantive involvement in democratic practice. The purpose of this study is to analyze the level of political participation of students at SMA ITP Surabaya, identify challenges in creating a culture of democracy, and find opportunities to improve it in the school environment. This research was conducted with a quantitative approach with a survey method. The survey was conducted to 75 students from grades X, XI, and XII, who were selected using proportional sampling techniques, with a 5-point Likert scale instrument, and analyzed using percentage descriptive statistics. The results showed that the level of political participation of students was categorized as high (77%), their understanding of democratic values was categorized as high (82.4%), and other indicators were also in the high category. However, there is a gap between the high understanding of democratic values and participation practices that are not fully optimal, so it is necessary to strengthen more active and consistent participation in the school environment.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-01-07 Direvisi: 2026-02-13 Dipublikasi: 2026-03-02 Kata kunci: <i>Partisipasi Politik; Demokrasi Sekolah; Siswa; Generasi Muda.</i>	Demi kemajuan demokrasi, generasi muda termasuk siswa sekolah menengah atas harus mampu berpartisipasi aktif. Namun, partisipasi politik siswa sering kali cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan substantif dalam praktik demokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi politik siswa di SMA ITP Surabaya, mengidentifikasi tantangan dalam menciptakan budaya demokrasi, dan menemukan peluang untuk meningkatkannya di lingkungan sekolah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Survei dilakukan kepada 75 siswa dari kelas X, XI, dan XII, yang dipilih menggunakan teknik <i>proportional sampling</i> , dengan instrumen skala Likert 5 poin, dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi politik siswa dikategorikan tinggi (77%), pemahaman mereka tentang nilai demokrasi dikategorikan tinggi (82,4%), serta indikator lainnya juga berada pada kategori tinggi. Namun, terdapat kesenjangan antara tingginya pemahaman nilai demokrasi dengan praktik partisipasi yang belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan penguatan partisipasi yang lebih aktif dan konsisten di lingkungan sekolah.

I. PENDAHULUAN

Kemajuan demokrasi di Indonesia, menuntut keterlibatan seluruh warga negara, termasuk generasi muda, dalam partisipasi politik yang aktif, sadar, dan bertanggung jawab. Sekolah merupakan ruang strategis untuk membangun karakter demokratis melalui pendidikan dan praktik kehidupan berorganisasi (Wati & Anggriani, 2024; Pramana & Trihantoyo, 2021). Partisipasi politik generasi muda sering kali masih bersifat simbolik dan prosedural, serta belum mencerminkan keterlibatan substantif maupun kesadaran kritis dalam kehidupan demokrasi. Identitas politik siswa sekolah menengah atas berada dalam tahap

perkembangan di tengah arus digitalisasi dan globalisasi (Makki, 2025).

Secara konseptual, merujuk pada keterlibatan individu dalam aktivitas yang bertujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik dipahami sebagai aktivitas warga negara dalam memilih pemimpin, memengaruhi kebijakan, serta terlibat dalam proses politik lainnya (Verba dkk., 1973; Almond & Verba, 1963). Partisipasi politik dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam organisasi sekolah, musyawarah, diskusi publik, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah (Sofiyani dkk., 2024).

Partisipasi politik siswa di sekolah seperti SMA ITP Surabaya masih menghadapi berbagai tantangan. Keterlibatan dalam organisasi intra sekolah seperti OSIS atau forum musyawarah siswa sering kali lebih dimaknai sebagai aktivitas administratif daripada sebagai sarana pembelajaran demokrasi. Kesadaran politik yang matang juga dihambat oleh rendahnya literasi politik, pengaruh media digital yang tidak selalu konstruktif, serta terbatasnya ruang diskusi kritis. Sebaliknya, ada potensi signifikan untuk mengintegrasikan pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ke dalam pendidikan. PPKn memiliki peran strategis untuk mendorong internalisasi nilai demokrasi secara kontekstual dan aplikatif (Hidayat, 2025; Afriani & Solihat, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara prinsip pendidikan demokrasi dan bagaimana siswa berpartisipasi politik di lapangan.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan, lingkungan keluarga, media, dan pengalaman berorganisasi di sekolah adalah beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi politik generasi muda (Riyanti dkk., 2023; Hidayah dkk., 2024). Temuan tersebut menegaskan pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran politik dan sikap demokratis siswa. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada kajian teoritis atau menggunakan mahasiswa sebagai subjek penelitian. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji partisipasi politik siswa SMA dalam konteks lokal sekolah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan data empiris kontekstual tentang partisipasi politik siswa di SMA ITP Surabaya.

Penguatan budaya demokrasi di sekolah dapat dilakukan melalui pembelajaran partisipatif, simulasi praktik demokrasi, forum diskusi publik, serta pengembangan kelas sebagai laboratorium demokrasi. Sekolah juga dapat menggunakan media digital untuk meningkatkan literasi politik siswa dan membuat mereka lebih kritis dalam menyaring informasi. Penciptaan iklim demokratis yang inklusif dan dialogis menjadi penting, dengan melibatkan peran aktif guru, sekolah, dan siswa. Dengan demikian, tantangan yang ada dapat menjadi peluang untuk membangun generasi muda yang berpartisipasi, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bangsa dan negara jika digunakan dengan cara yang tepat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi politik siswa di SMA ITP

Surabaya, mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam membangun budaya demokrasi, dan menemukan cara untuk meningkatkan keterlibatan politik generasi muda di lingkungan sekolah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan gambaran empiris gambaran tentang peran pendidikan sekolah dalam membentuk kesadaran politik siswa di sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana tingkat partisipasi politik siswa di SMA ITP Surabaya; 2) apa saja tantangan dalam membangun budaya demokrasi di sekolah; dan 3) bagaimana peluang peningkatan partisipasi politik siswa di lingkungan sekolah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan kajian pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi politik generasi muda. Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi sekolah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembelajaran yang mendukung penguatan demokrasi di lingkungan pendidikan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tingkat partisipasi politik siswa SMA ITP Surabaya dalam pembangunan budaya demokrasi di sekolah. Pendekatan kuantitatif dipilih karena berfokus pada pengukuran gejala sosial menggunakan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik dan disajikan dalam bentuk persentase, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menekankan pada penjelasan fenomena dengan menggunakan instrumen terstruktur untuk mengumpulkan data lapangan. Temuan penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris tentang kesulitan dan peluang partisipasi politik para generasi muda di lingkungan pendidikan (Zahra & Nabila, 2024).

Penelitian ini melibatkan seluruh siswa sebagai populasi penelitian SMA ITP Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan *proportional random sampling* berdasarkan jenjang kelas, dengan tujuan memberikan kesempatan yang seimbang bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. Jumlah populasi siswa SMA ITP Surabaya adalah 383 siswa, kemudian diambil sampel sebanyak 75 siswa yang terdiri dari 25 siswa dari setiap jenjang kelas (X, XI, dan XII), sehingga total siswa yang berpartisipasi dalam penelitian berjumlah 75 siswa. Jumlah sampel ini dianggap representatif untuk memberikan gambaran

empiris tentang tingkat partisipasi politik siswa di SMA ITP Surabaya.

Untuk mengumpulkan data, survei dilakukan menggunakan kuesioner tertutup yang dibagikan secara langsung kepada responden di sekolah. Penggunaan kuesioner secara langsung bertujuan untuk memudahkan pengawasan dalam proses pengisian, memastikan bahwa semua pertanyaan dijawab secara menyeluruh, dan meminimalkan kendala teknis yang mungkin muncul saat menggunakan angket daring. Untuk menjaga kejujuran dan objektivitas jawaban responden, siswa mengisi angket secara mandiri dalam waktu yang telah ditentukan dan di bawah pengawasan peneliti atau guru pendamping.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode survei, di mana responden menerima kuesioner tertutup (Ruane dkk., 2021). Angket ditulis sebagai pernyataan dengan lima pilihan jawaban berdasarkan skala Likert: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan tingkat keterlibatan siswa terhadap berbagai aspek partisipasi politik. Tabel indikator berikut digunakan untuk membuat angket penelitian sebagai berikut.

Tabel 1. Indikator Partisipasi Politik Siswa

No.	Indikator	Deskripsi
1.	Keterlibatan dalam kegiatan demokratis sekolah	Keikutsertaan dalam OSIS, pemilihan ketua OSIS, musyawarah kelas, dan kegiatan organisasi
2.	Keberanian menyampaikan pendapat	Partisipasi aktif dalam diskusi kelas dan forum sekolah
3.	Pemahaman nilai demokrasi	Pemahaman tentang musyawarah, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga sekolah
4.	Sikap terhadap isu sosial di lingkungan sekolah	Kepedulian dan respons terhadap permasalahan di sekolah atau masyarakat

Angket disusun dengan mempertimbangkan teori yang relevan terkait partisipasi politik dan pendidikan demokrasi untuk memastikan instrumen yang digunakan berkualitas (Zaman dkk., 2023). Setiap pernyataan dibuat dengan cara yang sesuai dengan sifat siswa SMA dan menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Sebelum digunakan, instrumen diuji validitas isi melalui *expert judgement* oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menilai kesesuaian indikator, kejelasan redaksi, dan keterkaitan dengan tujuan penelitian. Validitas isi ini bertujuan memastikan instrumen mampu mengukur konsep yang

diteliti. Selain itu, dilakukan uji validitas empiris menggunakan korelasi *Product Moment* untuk mengetahui validitas setiap butir pernyataan, serta uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,70. Berikut adalah tabel angket penelitian terkait partisipasi politik siswa.

Tabel 2. Angket Partisipasi Politik Siswa

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Saya selalu menggunakan hak suara dalam pemilihan ketua OSIS.	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Saya aktif mengikuti musyawarah atau rapat kelas.	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Saya pernah terlibat dalam organisasi atau kepanitiaan sekolah.	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Saya merasa penting untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.	☐	☐	☐	☐	☐
5.	Saya berani menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas.	☐	☐	☐	☐	☐
6.	Saya tidak takut berbeda pendapat dengan teman.	☐	☐	☐	☐	☐
7.	Saya menyampaikan kritik atau saran dengan sopan.	☐	☐	☐	☐	☐
8.	Saya menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi.	☐	☐	☐	☐	☐
9.	Saya memahami pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan.	☐	☐	☐	☐	☐
10.	Saya mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai siswa.	☐	☐	☐	☐	☐
11.	Saya percaya setiap siswa memiliki hak yang sama untuk berpendapat.	☐	☐	☐	☐	☐
12.	Saya memahami bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar.	☐	☐	☐	☐	☐
13.	Saya peduli terhadap permasalahan yang terjadi di sekolah.	☐	☐	☐	☐	☐
14.	Saya ikut memberikan solusi ketika ada masalah di kelas.	☐	☐	☐	☐	☐
15.	Saya mengikuti informasi tentang kegiatan atau kebijakan sekolah.	☐	☐	☐	☐	☐
16.	Saya berdiskusi dengan teman mengenai isu yang terjadi di sekolah.	☐	☐	☐	☐	☐
17.	Saya merasa sekolah memberi kesempatan untuk berpartisipasi.	☐	☐	☐	☐	☐
18.	Guru mendorong siswa untuk aktif dalam diskusi dan musyawarah.	☐	☐	☐	☐	☐
19.	Lingkungan pertemanan memengaruhi saya untuk aktif dalam kegiatan sekolah.	☐	☐	☐	☐	☐
20.	Saya berusaha menjadi siswa yang aktif dalam kehidupan demokratis di sekolah.	☐	☐	☐	☐	☐

Rumus Persentase:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Total Skor yang Diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

Skor maksimal per siswa = $20 \times 5 = 100$

Rentang kategori ditetapkan sebagai berikut:

81 - 100% = Sangat Tinggi

61 - 80% = Tinggi

41 - 60% = Sedang
21 - 40% = Rendah
0 - 20% = Sangat Rendah

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Data dianalisis dalam bentuk persentase, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi untuk melihat kecenderungan dan variasi jawaban responden. Perhitungan ini digunakan untuk menentukan kecenderungan dominan pada setiap indikator. Selain itu, hasil skor dikategorikan ke dalam beberapa tingkat, seperti sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Kategori tersebut disusun berdasarkan konversi skala Likert ke dalam bentuk persentase dengan menggunakan interval kelas menurut pendekatan statistik deskriptif (Sugiyono, 2017). Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan uraian naratif yang menjelaskan secara menyeluruh makna data. Melalui analisis deskriptif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat partisipasi politik siswa di SMA ITP Surabaya. Penelitian juga diharapkan dapat menemukan tantangan dan peluang untuk membangun demokrasi di kalangan generasi muda terutama di tingkat sekolah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Studi ini melibatkan 75 siswa dari SMA ITP Surabaya, terdiri dari 25 siswa dari kelas X, 25 siswa dari kelas XI, dan 25 siswa dari kelas XII. Komposisi responden terdiri dari 38 siswa laki-laki (50,7%) dan 37 siswa perempuan (49,3%). Komposisi ini menunjukkan bahwa responden cukup representatif dalam menjelaskan situasi partisipasi politik siswa di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil pengolahan data angket terhadap 20 pernyataan dengan skor maksimal 100 per siswa, diperoleh skor keseluruhan sebesar 5.775 dari skor maksimal 7.500 (75×100). Dengan demikian, tingkat partisipasi politik siswa secara umum adalah sebagai berikut:

$$\frac{5775}{7500} \times 100\% = 77\%$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik siswa berada pada kategori "Tinggi" (77%), yang mengindikasikan bahwa partisipasi politik siswa sudah cukup baik, namun belum mencapai kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan adanya ruang

untuk peningkatan kualitas partisipasi, terutama pada aspek keterlibatan yang lebih substantif.

Hasil Berdasarkan Indikator

1. Keterlibatan dalam Kegiatan Demokratis Sekolah

Berdasarkan 5 pernyataan pada indikator ini, skor totalnya yang diperoleh adalah 1.395, dengan persentase sebagai berikut::

$$\frac{1395}{1875} \times 100\% = 74,4\%$$

Kategori: Tinggi

Data menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menggunakan hak mereka untuk mengambil bagian dalam musyawarah kelas dan pemilihan ketua OSIS. Namun, tingkat keterlibatan dalam organisasi atau kepanitiaan masih belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masih cenderung berada pada level partisipasi dasar, seperti voting dan kehadiran, dan belum sepenuhnya berkembang ke arah keterlibatan strategis seperti kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

2. Keberanian Menyampaikan Pendapat

Indikator ini mendapatkan skor total 1.470 dari 1.875, dengan persentase:

$$\frac{1470}{1875} \times 100\% = 78,4\%$$

Kategori: Tinggi

Sebagian besar siswa menyatakan berani menyampaikan pendapat dan menghargai pandangan orang lain. Diskusi kelas menjadi ruang yang cukup kondusif bagi siswa untuk mengemukakan gagasan. Hal ini mengindikasikan mulai berkembangnya budaya dialogis di lingkungan sekolah. Namun demikian, masih terdapat sebagian siswa yang menunjukkan keraguan atau kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat di lingkungan sekitarnya.

3. Pemahaman Nilai Demokrasi

Indikator ini menerima total 1.545 poin dari 1.875 poin, dengan persentase:

$$\frac{1545}{1875} \times 100\% = 82,4\%$$

Kategori: Sangat Tinggi

Hasil ini menunjukkan bahwa siswa sangat memahami prinsip demokrasi seperti musyawarah, kesetaraan hak dan

tanggung jawab, serta toleransi terhadap perbedaan. Tingginya capaian pada indikator ini mengindikasikan bahwa pembelajaran PPKn di sekolah telah membantu pemahaman konseptual tentang demokrasi. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan indikator partisipasi lainnya, terdapat kecenderungan bahwa pemahaman belum sepenuhnya diikuti oleh praktik partisipasi yang optimal.

4. Sikap terhadap Isu Sosial di Lingkungan Sekolah

Indikator ini mendapatkan total 1.365 dari 1.875, dengan persentase:

$$\frac{1365}{1875} \times 100\% = 72,8\%$$

Kategori: Tinggi

Siswa mengikuti informasi tentang kebijakan atau kegiatan sekolah dan peduli dengan masalah di sekolah. Namun demikian, keterlibatan aktif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut masih belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran sosial siswa sudah berkembang, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh tindakan partisipatif yang konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan jenjang kelas, kecenderungan partisipasi politik siswa menunjukkan variasi antara kelas X, XI, dan XII. Siswa kelas XII cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan kelas X, karena memiliki pengalaman yang lebih lama dalam lingkungan sekolah. Sementara itu, siswa kelas X masih berada pada tahap adaptasi, sehingga partisipasinya relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan pengalaman berorganisasi dan interaksi sosial di sekolah berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik siswa.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Partisipasi Politik Siswa

No.	Indikator	Skor	Persentase	Kategori
1	Keterlibatan Demokratis	1.395/1.875	74,4%	Tinggi
2	Keberanian Berpendapat	1.470/1.875	78,4%	Tinggi
3	Pemahaman Demokrasi	1.545/1.875	82,4%	Sangat Tinggi
4	Sikap Sosial	1.365/1.875	72,8%	Tinggi
Total		5.775/7.500	77%	Tinggi

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMA ITP Surabaya memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi (77%). Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum siswa telah terlibat dalam praktik demokrasi di lingkungan sekolah, meskipun tingkat keterlibatan tersebut masih perlu dianalisis lebih lanjut dari segi kualitas partisipasinya. Hasil ini menguatkan pandangan bahwa sekolah dapat menjadi tempat pendidikan politik yang cukup baik untuk menumbuhkan kesadaran partisipasi generasi muda (Riyanti dkk., 2023). Tingginya pemahaman nilai demokrasi (82,4%) menunjukkan bahwa siswa telah memiliki *civic literacy* yang baik, seperti musyawarah, kesetaraan hak, tanggung jawab, dan toleransi terhadap perbedaan. Namun demikian, temuan ini perlu dianalisis lebih dalam karena tingginya pemahaman tidak secara otomatis diikuti praktik partisipasi yang lebih optimal.

Sebaliknya, temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *civic literacy* (pemahaman demokrasi) dengan *civic engagement* (praktik partisipasi). Meskipun tingkat pemahaman demokrasi sangat tinggi, keterlibatan dalam kegiatan demokratis masih berada pada kategori tinggi namun belum maksimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi siswa masih cenderung bersifat simbolik dan prosedural, seperti mengikuti pemilihan atau hadir dalam musyawarah, tanpa diikuti keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan atau kepemimpinan (Riyanti dkk., 2023). Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *political efficacy*, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk memengaruhi proses politik (Dalton & Shin, 2014; Dalton, 2020). Rendahnya *political efficacy* pada sebagian siswa menyebabkan mereka merasa partisipasinya tidak memberikan dampak signifikan, sehingga cenderung pasif atau hanya terlibat secara formal. Oleh karena itu, tantangan utama dalam pendidikan demokrasi mentransformasikan partisipasi siswa dari yang bersifat prosedural menjadi partisipasi yang substantif, kritis, dan bertanggung jawab.

Indikator keberanian menyampaikan pendapat yang berada pada kategori tinggi (78,4%) mengindikasikan berkembangnya budaya dialogis di lingkungan sekolah. Sebagian besar siswa telah memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat

dan menghargai pendapat orang lain. Namun, masih terdapat sebagian siswa yang menunjukkan keraguan dan rendahnya kepercayaan diri untuk menyuarakan pendapat mereka di forum yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa selain pemahaman nilai, diperlukan penguatan aspek moral courage dan keterampilan komunikasi publik dalam membangun partisipasi positif yang efektif (Hidayah dkk., 2024). Jika tidak diatasi, kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan generasi muda kritis dan partisipatif (Ekman & Amnå, 2012). Dalam konteks ini, peran sekolah tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berlatih menyampaikan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab.

Namun, indikator sikap terhadap isu sosial di lingkungan sekolah yang berada pada kategori tinggi (72,8%) menunjukkan bahwa siswa memiliki kepedulian sosial. Namun, kepedulian tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tindakan nyata dalam menyelesaikan permasalahan. Temuan ini memperkuat adanya kesenjangan antara kesadaran sosial dengan tindakan partisipatif, di mana siswa cenderung mengetahui dan peduli, tetapi belum konsisten dalam bertindak. Pengaruh media sosial juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Media sosial sering kali membentuk partisipasi yang bersifat instan dan ekspresif, seperti memberikan komentar atau dukungan secara daring, namun tidak selalu diikuti dengan tindakan nyata di lingkungan sosial. Hal ini menyebabkan partisipasi siswa cenderung bersifat *superficial* atau dangkal, sehingga perlu diarahkan melalui pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif (Irhas, 2025; Umar dkk., 2022). Oleh karena itu, sekolah perlu mengembangkan pembelajaran berbasis partisipasi, seperti simulasi demokrasi, forum aspirasi siswa, serta melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan di kelas maupun sekolah, sehingga siswa tidak hanya memahami demokrasi, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini menunjukkan bahwa fondasi pemahaman demokrasi siswa sudah terbentuk dengan baik, sehingga terdapat peluang besar untuk mengembangkan partisipasi politik yang lebih substantif. Namun, tantangan utama terletak pada

bagaimana meningkatkan konsistensi dan kualitas partisipasi tersebut. Upaya penguatan budaya demokrasi di sekolah perlu difokuskan pada peningkatan *political efficacy* siswa, penguatan berpikir kritis, serta pemberian ruang partisipasi yang nyata dan bermakna. Dengan demikian, partisipasi politik siswa tidak hanya berhenti pada level kesadaran dan prosedur, tetapi berkembang menjadi partisipasi yang kritis, aktif, dan bertanya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMA ITP Surabaya memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi (77%). Hal ini mengindikasikan bahwa siswa telah memiliki keterlibatan awal dalam praktik demokrasi di lingkungan sekolah, meskipun belum sepenuhnya bersifat substantif. Dengan kategori yang sangat tinggi, pemahaman nilai demokrasi menjadi aspek paling kuat (82,4 persen), menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn relatif efektif dalam meningkatkan kesadaran konseptual siswa tentang musyawarah, kesetaraan hak, tanggung jawab, dan toleransi. Namun, sikap terhadap masalah sosial dan keterlibatan dalam kegiatan demokratis masih di kategori tinggi tetapi belum optimal, menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman nilai dan praktik partisipasi substantif. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara *civic literacy* dan *civic engagement*, di mana pemahaman siswa belum sepenuhnya diikuti oleh keterlibatan aktif dan konsisten dalam praktik demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek *political efficacy* siswa, keberanian menyampaikan pendapat, serta penciptaan ruang partisipasi yang lebih bermakna agar keterlibatan siswa tidak bersifat simbolik, tetapi benar-benar partisipatif dan bertanggung jawab.

B. Saran

Sekolah perlu memperkuat budaya demokrasi melalui pembelajaran yang lebih kontekstual dan partisipatif. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui program yang lebih terstruktur, seperti forum musyawarah siswa secara berkala (misalnya, forum aspirasi bulanan), simulasi praktik demokrasi seperti sidang OSIS ketua organisasi siswa, serta melibatkan aktif siswa dalam proses pengambilan keputusan di

lingkungan sekolah. Agar siswa tidak hanya memahami nilai-nilai demokrasi secara teoretis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata, guru PPKn dapat mengintegrasikan diskusi kritis dan isu-isu aktual ke dalam pelajaran dan proses pembelajaran. Selain itu, penguatan *digital civic literacy* juga perlu dilakukan agar siswa mampu memahami isu sosial dan politik secara bijak di era digital. Sekolah juga perlu menciptakan lingkungan diskusi yang demokratis dan inklusif, sehingga siswa merasa aman dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Melalui strategi tersebut, diharapkan partisipasi politik siswa yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi berkembang menjadi partisipasi yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga mampu mendukung pembangunan demokrasi generasi muda secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya hanya dilakukan pada satu sekolah sehingga hasilnya belum mampu digeneralisasikan secara luas, serta menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang belum mampu menggali secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik siswa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *mixed method* untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, serta melakukan studi komparatif antar sekolah guna melihat variasi budaya demokrasi dan partisipasi politik siswa yang lebih luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriani, F., & Solihat, I. (2025). Strategi pengembangan pendidikan nilai melalui pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, 1(02), 74-88.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). Political attitudes and democracy in five nations. *Boston: Little*.
- Dalton, R. J. (2020). *The good citizen: How a younger generation is reshaping American politics*. CQ press.
- Dalton, R. J., & Shin, D. C. (2014). Reassessing the civic culture model. *The civic culture transformed: From allegiant to assertive citizens*, 91-115.
- Ekman, J., & Amnå, E. (2012). Political participation and civic engagement: Towards a new typology. *Human affairs*, 22(3), 283-300.
- Hidayah, R. M. W., Abidin, E. S., Arifin, I., & Ahmad, M. R. S. (2024). Membangun kesadaran politik: pentingnya partisipasi generasi muda di era digital. *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial*, 1(02), 74-77.
- Hidayat, R. (2025). Internalisasi nilai Pancasila dalam pembentukan kesadaran konstitusional warga negara. *Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, 4(2), 282-297.
- Irhas, I. (2025). Sekolah sebagai laboratorium demokrasi: mewujudkan pendidikan berkualitas melalui prinsip pendidikan progresif Dewey. *Journal of Modern Social and Humanities*, 1(1), 24-30.
- Makki, M. A. (2025). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter pelajar siswa sekolah menengah atas (SMA). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 15(1), 32-38.
- Pramana, M. E. A., & Trihantoyo, S. (2021). Pembentukan karakter siswa melalui budaya sekolah di jenjang sekolah dasar. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 764-774.
- Riyanti, R., Luthfi, A., & Rohana, D. (2023). Peran generasi muda dalam pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 26-31.
- Ruane, J. M., Mustika, M. S., & Zakkie, I. M. (2021). *Angket; Sifat penyelidikan: Seri dasar-dasar metode penelitian*. Nusamedia.
- Sofiyan, F. H., Sanusi, A. R., & Susanto, E. (2024). Peran guru pendidikan Pancasila pada proyek suara demokrasi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik siswa kelas XI di SMAN 5 Karawang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 123-133.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Umar, E., Cuga, C., & Manangin, I. S. (2022). Analisis pembelajaran PKN sebagai

- laboratorium demokrasi pada siswa sekolah dasar. *Normalita (Jurnal Pendidikan)*, 10(2), 95-101.
- Verba, S., Nie, N. H., Barbic, A., Irwin, G., Molleman, H., & Shabad, G. (1973). The modes of participation: continuities in research. *Comparative Political Studies*, 6(2), 235-250.
- Wati, D. R., & Anggriani, M. (2024). Membangun karakter bangsa melalui pembelajaran PKn di sekolah dasar: tantangan dan strategi. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 1-13.
- Zahra, F. A., & Nabila, D. (2024). Pendidikan demokrasi sebagai alat penguat kebhinekaan dan toleransi di sekolah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 157-168.
- Zaman, A. Q., Irnawati, I., & Widyatama, P. R. (2023). PPKn teachers' efforts in understanding students through the merdeka belajar curriculum. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 8(4), 459-468.